

**PERSEPSI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERSIFAT
MULTIDIMENSIONAL DI SMA NEGERI SE-KOTA PURWOKERTO**

***PERCEPTIONS OF PANCASILA AND CITIZENSHIP EDUCATION TEACHERS ON
CIVIC EDUCATION ARE MULTIDIMENSIONAL IN SMA NEGERI SE-KOTA
PURWOKERTO***

Afriliani Khusnul Khotijah dan Cholisin, M.Si
NIM 13401244015
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Email: *13401244015@student.uny.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) persepsi guru PPKn tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional, 2) kendala guru PPKn dalam membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional serta 3) harapan guru PPKn untuk Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yakni dengan kriteria guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bidang keahlian Pendidikan Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *Cross Check* data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis data induktif, menurut Creswell yaitu membangun tema, kategori, pola dan makna.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Persepsi guru PPKn tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional digambarkan dalam: a) pendidikan politik membentuk kategori kesadaran politik, partisipasi politik, terlibat dalam pembuatan kebijakan publik pola umum terlibat dalam Pemilihan umum dan kegiatan diskusi; b) pendidikan demokrasi dengan kategori adanya kebebasan, kesamaan, demokrasi Pancasila dengan pola umum kebebasan berpendapat dan musyawarah mufakat; c) pendidikan HAM dengan kategori kesadaran HAM dan persamaan HAM dengan pola umum menghargai dan menghormati hak orang lain; d) pendidikan karakter dengan kategori penanaman nilai, sikap dan perilaku berkarakter dengan pola umum keteladanan, kebiasaan, disiplin, tanggung jawab; e) pendidikan hukum dengan kategori kesadaran hukum dengan pola umum paham tentang hak dan kewajiban warga negara dalam lingkungan apapun dan hal-hal yang bersifat religius; 2) kendala guru PPKn dalam membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional kurang mendalamnya materi Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional, keterbatasan jam mengajar, kurang memiliki kesiapan dalam perubahan materi, belum adanya komitmen yang sama antara pemerintah dengan sekolah dalam pendidikan karakter; 3) harapan guru PPKn untuk Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional, yakni: a) siswa ikut terlibat dalam partisipasi politik; b) siswa dapat menerapkan demokrasi secara konsisten dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat; c) siswa dapat saling hormat menghormati, tidak melanggar HAM; d) siswa dapat bersikap dan berperilaku berkarakter yang baik.

Kata kunci: *Persepsi guru PPKn, PPKn bersifat multidimensional*

ABSTRACT

This study aims to describe 1) the perception of PPKn teachers on Citizenship Education is multidimensional, 2) the constraints of PPKn teachers in teaching the Citizenship Education

is multidimensional and 3) the expectations of the PPKn teachers for Citizenship Education are multidimensional in SMA Negeri Se-Kota Purwokerto.

The research approach used is qualitative with descriptive method. Technique of determining research subject using purposive technique, that is with criterion of subject teacher of Pancasila and Citizenship Education with area of Civic Education expertise. Data collection techniques used interviews and documentation. Technique examination of data validity used is Cross Check data. Data obtained were analyzed using inductive data analysis method, according to Creswell that is building theme, category, pattern and meaning.

The results of this study indicate that, 1) The perceptions of PPKn teachers on Citizenship Education are multidimensional in nature described in: a) political education forming categories of political awareness, political participation, engaging in public policy making general patterns of involvement in elections and discussion activities; b) education of democracy in the category of freedom, equality, Pancasila democracy with a general pattern of freedom of expression and consensus deliberation; c) human rights education with the category of human rights awareness and human rights equality with a common pattern of respecting and respecting the rights of others; d) character education with the category of cultivation of values, attitudes and behaviors characterized by the general pattern of exemplary, custom, discipline, responsibility; e) legal education with the category of legal consciousness with a general pattern of understanding about the rights and obligations of citizens in any environment and things that are religious; 2) the obstacles of PPKn teachers in learning Citizenship Education are multidimensional in depth Civic Education materials are multidimensional, limited teaching hours, lack of readiness in material change, lack of equal commitment between government and schools in character education; 3) the expectations of PPKn teachers for Citizenship Education are multidimensional, ie: a) students are involved in political participation; b) students can apply democracy consistently in family, school and community settings; c) students may respect each other, not violate human rights; d) students can behave and behave in good character.

Keywords: Perception of PPKn teacher, Civics is multidimensional

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyaring atau *filter* pengaruh negatif globalisasi dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan atau yang disingkat PPKn merupakan pendidikan yang strategis untuk mewujudkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang bermartabat untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Secara metodologis, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi *Social Studies* yakni

transmisi kewarganegaraan (*citizenship transmission*) seperti yang dikemukakan oleh Barr, Bart, dan Shermis (1978). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai *citizenship education*, yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001). Selain ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan (*civic virtue* dan *civic culture*) yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), keyakinan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic competence*), (CCE: 1998 dalam Abdul Aziz dan Sapriya 2011: 97). Menurut Winataputra

(2011), sifat multidimensional inilah yang membuat bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Hal itu tergantung dari objek kajian mana kita berangkat, dengan metodologi mana pengetahuan itu dibangun, dan untuk arah mana kegiatan itu akan membawa implikasi.

Secara filsafat keilmuan, seperti dikemukakan oleh Chreshore (1886) dalam Abdul Aziz dan Sapriya (2011, 97), Pendidikan Kewarganegaraan memiliki objek kajian pokok ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik untuk hak dan kewajiban. Dari objek kajian pokok inilah berkembang konsep *Civics* yang secara harfiah diambil dari bahasa Latin *civicus* yang artinya warga negara pada zaman Yunani Kuno. Secara akademis, *civics* diakui sebagai embrionya *Civic Education* dan di Indonesia selanjutnya diadaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian materinya berkembang mencakup demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan masuknya unsur pendidikan. Sedangkan visi *Civic Education* adalah dalam rangka *nation and character building*, *citizen empowerment*, dan mengembangkan masyarakat madani (*civic society*). Dan misi *Civic Education* adalah mengembangkan warga negara yang lebih baik (*good citizen*), yaitu warga negara yang demokratis atau memiliki kemampuan untuk berpartisipasi (Cholisin, 2000: 1.2). Jika perspektif ini digunakan maka dominan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi dan pendidikan politik.

Hal yang paling pokok dalam diri seseorang adalah kebebasan adanya hak asasi yang harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan yang mempelajari tentang hak-hak dan kewajiban warga negara maka pemahaman yang utama yang harus ditanamkan adalah nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) terlebih dahulu. Dengan

demikian pendidikan Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan misi dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Keberhasilan pembelajaran di sekolah dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi, politik, HAM dan karakter untuk memenuhi kompetensi yang hendak dicapai merupakan tugas seorang guru PPKn. Guru PPKn dituntut memiliki 4 (empat) kompetensi yakni kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru dan Kompetensi Guru dilihat dari kompetensi profesional guru PPKn yakni: 1) memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; 2) memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*); 3) menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru PPKn sebagai bagian terpenting dalam mengembangkan warga negara yang baik, namun melihat hasil dari survei Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 di Yogyakarta berbeda jauh dari yang diharapkan seperti yang dipaparkan dalam kutipan berita dibawah ini:

“Pada tahun 2015, rerata hasil capaian Uji Kompetensi Guru atau UKG adalah 56,69 yang lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 47,00, dengan jumlah peserta UKG 2.699.516 guru. Jika dilihat hasil UKG guru-guru DIY rerata capaiannya adalah 67,02 dan hasil tersebut tertinggi di Indonesia. Harus kita akui capaian ini belumlah memuaskan, dan dari data tersebut kita bisa mengukur kemampuan guru-guru kita.

Data yang lebih menarik lagi untuk menggambarkan pengetahuan (kognitif) guru-guru di Indonesia. Hasil nilai UKG di atas 60 jenjang SD ada 50,68%, Sekolah Dasar hanya 31,62%, SMP

43,84%, SMA 53,55% SMK 44,53% dan guru-guru SLB 42,19%.” (http://www.krjogja.com/web/news/read/25465/Uji_Kompetensi_Guru) diakses tanggal 28 Febuari 2017 pukul 16.15.

Uji Kompetensi Guru atau UKG merupakan sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar bidang studi atau pada kemampuan kompetensi profesional dan paedagogik bidang studi. Dengan ini berarti kompetensi guru PPKn juga lemah dalam penguasaan bidang studi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, apalagi dalam memahami Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional yang lebih ke penerapan sikap dan keterampilan.

Berdasarkan kajian telaah dan teoritik dan kajian empiris tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional, khususnya pada jenjang SMA, memiliki masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) rendahnya kompetensi guru dalam kompetensi profesional dan paedagogis terhadap pemaknaan dan penguasaan materi Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional, (2) guru PPKn belum memahami orientasi, konsep Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dalam pembelajaran, (3) Belum adanya penelitian tentang PPKn bersifat multidimensional.

Guru sebagai kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah, dan hal yang utama harus dimiliki guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah memenuhi kompetensi guru.

Solusi yang tepat untuk mengungkap gejala-gejala yang telah diidentifikasi diatas adalah dengan cara melibatkan guru PPKn sebagai subyek penelitian dengan cara menggali secara lebih dalam persepsi guru PPKn tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional. Objek penelitian ini adalah Guru PPKn di SMA Negeri se-Kota Purwokerto. Alasan dilakukan penelitian di SMA Negeri se-Kota Purwokerto berdasarkan beberapa kriteria

pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun, kualifikasi akademik lulusan Strata 1 (S1) PKn yang berasal dari Perguruan Tinggi berbeda-beda, aktifitas dalam keikutsertaan PLPG PPKn se-Kabupaten Banyumas dan kualitas sekolah. Berdasarkan paparan di atas peneliti mengambil judul “Persepsi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tentang Pendidikan Kewarganegaraan Bersifat Multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin memaparkan makna yang menjadi rumusan masalah. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Se-Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian mengenai “Persepsi Guru PKn tentang Pendidikan Kewarganegaraan Bersifat Multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto” dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu: mulai bulan 15 April sampai 15 Juli 2017.

Jenis data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui proses wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber data primer menggunakan teknik *purposive*, yakni yakni dengan kriteria guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bidang keahlian Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, atau biasa juga disebut wawancara mendalam, wawancara insentif, wawancara kualitatif, wawancara etnografis, atau wawancara terbuka (*open-ended interview*). Pada penelitian ini dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan persepsi guru PKn tentang

Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah *cross check* data. Hasil wawancara antar subjek penelitian di *cross check* dengan hasil dokumentasi yang sudah terkumpulkan, selain itu juga sebagai pembanding hasil wawancara antar subjek penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif dalam penelitian ini merujuk pada logika induktif dalam penelitian kualitatif yang diperkenalkan oleh John. W Creswell (2016: 96).

Berikut mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif (John W. Creswell, 2016: 96). Langkah-langkah logika induktif dalam penelitian kualitatif sebagai metode data ini antara lain:

1. Peneliti memulai penelitiannya dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para partisipan.
2. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada partisipan dan merekamnya.
3. Peneliti membentuk informasi menjadi kategori-kategori atau tema-tema tertentu.
4. Peneliti kemudian mengembangkan tema-tema menjadi pola-pola, teori-teori atau generalisasi-generalisasi yang nantinya diperbandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau dengan literatur-literatur yang ada.
5. Peneliti mengemukakan generalisasi-generalisasi atau teori-teori dari literatur dan pengalaman-pengalaman pribadinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi lokasi penelitian

Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Berbagai julukan disandang kota di jalur selatan Jawa Tengah ini dari kota wisata, kota kripik, kota transit, kota pendidikan sampai kota pensiunan karena begitu banyaknya pejabat-pejabat negara yang pensiun dan akhirnya menetap di kota

ini. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Se-Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih tempat ini karena di SMA Negeri se-Kota Purwokerto pada waktu dilakukan observasi di beberapa sekolah yang ada di Kota Purwokerto terdiri dari SMA Negeri 1 Purwokerto, SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA Negeri 3 Purwokerto, SMA Negeri 4 Purwokerto dan SMA Negeri 5 Purwokerto.

2. Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ada pria dan wanita yang berprofesi sebagai guru PKn di SMA Negeri se-Kota Purwokerto. Usia subjek penelitian rata-rata sudah lebih dari 50 tahun. Pendidikan terakhir subjek penelitian rata-rata Strata-1 (S1) dan Strata-2 (S2) dan pengalaman mengajar subjek penelitian sudah lebih dari 10 tahun.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti mengidentifikasi tema utama dari proses analisis data yang dilakukan. Tema-tema tersebut memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan persepsi guru PPKn tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional. Pembahasan ini memuat tentang interpretasi hasil, keterbatasan penelitian. Perbandingan antara hasil penelitian ini dengan teori, konsep, maupun hasil penelitian sebelumnya akan disajikan pada bagian interpretasi hasil, sedangkan perbandingan proses penelitian yang terlaksana dengan rencana penelitian akan diuraikan dalam keterbatasan penelitian.

a. Persepsi guru PKn tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto

Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional berhubungan dengan politik, hukum, demokrasi, HAM, karakter dan hal-hal yang religius tersebut akan dipaparkan lebih mendalam dan dijadikan kategori untuk lebih mengetahui persepsi guru PKn tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional, yakni:

1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik

Pemberian makna yang dipahami oleh subjek penelitian adalah persepsi yang menjadi acuan bagi guru dalam mengkonstruksikan pendidikan politik sebagai misi Pendidikan Kewarganegaraan. Makna pendidikan politik yang dikemukakan oleh subjek penelitian bahwa pendidikan politik sebagai upaya memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya dengan memperkenalkan dan memberi pemahaman kepada peserta didik hal-hal yang berhubungan tentang pemerintahan, tentang kenegaraan, peraturan perundangan dan juga mendorong peserta didik untuk berpartisipasi politik seperti dalam lingkungan sekolah sebagai bentuk perilaku partisipasinya mengikuti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas dan sebelum menentukan kandidat siswa diskusikan dimasing-masing kelas. Upaya pendidikan politik seperti ini mendorong sistem politik demokrasi agar mampu memelihara konflik dan konsensus, seperti yang dikatakan Prewitt dan Dawson (1977: 140-141) dalam Cholisin (2015:5) menyatakan ada dua tipe pengajaran politik yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dan indoktrinasi politik. James Coleman, membedakan antara kedua tipe itu, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan atau latihan kewarganegaraan (*civic training*) merupakan bagian dari pendidikan politik yang menekankan bagaimana seorang warga negara yang baik berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Oleh karena itu subjek sebagai guru hendaknya paham dan memiliki kesadaran mengenai pemaknaan terkait dengan pendidikan politik sehingga akan memberikan pemahaman yang sejalan kepada peserta didik dan akan melakukan partisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik.

Namun persepsi di atas merupakan bagian dari sosialisasi politik dalam dua tipe sosialisasi politik yakni sosialisasi politik langsung dan sosialisasi politik tidak langsung, hal ini cenderung bahwa

pendidikan politik di sekolah merupakan sosialisasi politik langsung seperti penjelasan dalam Cholisin (2000: 6.8) bahwa dalam belajar politik metode pendidikan politik bersifat dialogis, terbuka, rasional atau penyadaran. Di sekolah lewat PKN arahnya yaitu pada menumbuhkan '*Good Citizenship*' atau agar anak menjadi efektif bagi bangsanya. Kegiatan yang dilakukan terutama terletak pada berpartisipasi memperoleh informasi-informasi politik, misalnya membaca buku-buku teks, mengikuti perkembangan lewat media masa elektronik dan non-elektronik, dll. Jadi pendidikan politik yang dipahami guru sudah menerapkan politik politik metode pendidikan politik yang bersifat dialogis, terbuka, rasional dan penyadaran. Ketika peserta didik mampu sadar tentang peranannya maka perilaku juga dapat dibentuk sedikit demi sedikit.

Dengan demikian peneliti mengungkapkan pemahaman guru PPKn mengenai pendidikan politik adalah hanya memberikan pemahaman tentang kesadaran politik, ikut berpartisipasi politik dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik yang lebih ditekankan pada orientasi dan sikap, namun dalam praktik perilaku guru belum paham dan belum menerapkan perilaku yang mencerminkan partisipasi politik, sehingga peneliti berharap agar guru lebih mengembangkan pada aspek membentuk perilaku yang dapat diamati dalam keterkaitannya keterlibatan yang berhubungan dengan politik namun dalam cakupan di lingkungan sekolah salah satunya terlibat dalam membuat keputusan kegiatan sekolah.

2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi

Persepsi tentang pendidikan demokrasi dipahami guru PPKn tentang menjamin adanya kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh kebebasan hak orang lain dan aturan yang berlaku, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi. Salah satu kebebasan berpendapat yang diajarkan guru PPKn dalam lingkup sekolah yakni

membiasakan dengan diskusi dalam proses pembelajaran apabila terjadi perbedaan pendapat harus diselesaikan pada waktu itu juga dan mengikuti apa yang diatur oleh moderator, memberikan suara melalui pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan lain-lain. Pelaksanaan demokrasi yang dialami peserta didik terkait dengan pendapat Zamroni bahwa nilai kebebasan dalam demokrasi adalah bebas dalam arti tidak mengganggu kebebasan orang lain atau bebas yang bertanggung jawab karena memiliki kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Untuk itu pemahaman nilai kebebasan ini harus benar-benar dimaknai dan dipahami betul oleh warga negara agar dapat dibudayakan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara Zamroni (2013: 3). Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab merupakan proses pendidikan demokrasi yang harus dipraktikkan secara terus menerus dan membutuhkan proses, sehingga lingkup sekolah merupakan wahana yang paling cocok mempraktekkan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu persepsi guru PPKn tentang pendidikan demokrasi yakni menanamkan nilai menghargai persamaan anggota masyarakat, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama disetiap bidang tanpa diskriminatif. Persepsi subjek penelitian belum sesuai dengan Hendra bahwa prinsip kesamaan (kesetaraan atau persamaan) tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan atau pendapat-pendapat mereka (Hendra, 2006: 78). Manusia dilahirkan dengan berbagai perbedaan agama, ras, suku dan karakter yang berbeda-beda hal ini sering kali yang memicu adanya diskriminatif, konflik dan lain-lain, persepsi guru PPKn tentang pola ini masih belum terwujud, apalagi yang berkaitan dengan menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan atau pendapat-pendapat mereka.

Dalam hal ini peneliti menginterpretasikan bahwa pendidikan demokrasi sebagai misi Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis dan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, terkait konsep nilai-nilai demokrasi yang sudah dipahami oleh subjek penelitian maka akan mudah dalam memberikan pemahaman, kesadaran dan sudah mengalami demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai kepada peserta didik sebagai upaya untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis.

3) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan HAM

Persepsi guru PPKn memberi makna tentang pendidikan HAM sebagai salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya memberikan pemahaman tentang HAM yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila salah satunya hak yang paling dasar adalah hak hidup sejak dalam kandungan karena kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sehingga pendidikan HAM ini bertujuan agar setiap warga negara melakukan kewajiban menghormati hak orang lain sebagai bentuk kewajiban terhadap sesama manusia dan tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *nation and character building*, yakni membangun karakter manusia Indonesia yang Pancasila, karena ideologi Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia (Cholisin, 2015: 3). Pemahaman konsep mengenai HAM pada dasarnya sudah dipahami subjek penelitian karena sudah mengacu pada nilai-nilai Pancasila terutama mempertanggung jawabkan dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai moral sehingga meski dalam kandungan hak hidupnya di lindungi dalam sebuah negara.

Selain itu subjek penelitian memberikan pemahaman tentang tujuan agar anak memahami banyak status (hak dan kewajiban) warga negara. Dalam sekolah atau ruang kelas sedang belajar Pendidikan Kewarganegaraan statusnya sebagai siswa

sedang berinteraksi dengan guru PPKn, seorang siswa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai siswa, tapi pada saat yang sama anak punya status sebagai anggota masyarakat sebagai warga negara juga melekat hak dan kewajibannya. Di dalam lingkungan sekolah kewajibannya yang diatur dalam tata tertib di sekolah, di dalam lingkungan masyarakat ada aturan-aturan yang disepakati masyarakat anak tersebut tinggal, dan sebagai warga negara hak dan kewajibannya diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sesuai dengan pendapat Azzumardi dalam Cholisin (2015: 9) bahwa pendidikan HAM mengandung pengertian sebagai aktifitas mentransformasikan nilai-nilai HAM agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia (Cholisin, 2015: 9). Guru PPKn terkait pembelajaran materi tentang HAM sudah sesuai dengan Pancasila misalnya hak hidup sejak dalam kandungan sehingga janin dalam kandungan wajib dijaga, dilindungi hak nya untuk hidup. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran baru tentang memberikan pemahaman bahwa siswa memiliki banyak status yang berbeda-beda tergantung anak-anak berada misal di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara sehingga akan tumbuh kesadaran menghormati HAM orang lain.

4) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter

Pendidikan karakter merupakan pendidikan moral yang akan membentuk sikap warga negara yang sesuai dengan aturan dimana ia berada, contohnya siswa yang berkarakter di sekolah akan bertindak sesuai dengan aturan sekolah, ketika di lingkungan masyarakat akan bertindak sesuai aturan yang ada dimasyarakat dan ketika sebagai warga negara akan bertindak dan bersikap sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Subjek penelitian juga memaparkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan salah satu upaya membentuk karakter warga

negara yang memiliki disiplin, saling menghargai, jiwa patriotisme dan nasionalisme terhadap negaranya dan juga sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dalam pendapat Kirschenbaum (1995:16) dalam (Darmiyati Zuchdi, 2009: 115-116) bahwa pendidikan karakter adalah memiliki rasa hormat (terhadap orang lain dan diri sendiri, menjaga hak milik dan lingkungan), rasa tanggung jawab (terpercaya, jujur, dapat diandalkan, rasa kasihan (suka menolong, bersahabat, empatik, manusiawi, toleran), disiplin (tekun, rajin), loyalitas, keberanian, etos kerja. Guru PPKn memahami bahwa nilai-nilai tersebut juga di terapkan dalam pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah agar tercipta ketertiban dan membentuk warga negara yang berakhlak mulia.

Terkait hal lain dipahami bahwa pendidikan karakter sebagai upaya menanamkan nilai-nilai yang berkarakter dengan melakukan kebiasaan dan keteladanan. Dalam pendidikan karakter Lickona (1992) dalam Ratna Megawangi (2009: 108) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik yaitu *moral knowing* atau pengetahuan moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan bermoral.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran baru dalam pendidikan karakter yakni karakter yang ditanamkan sudah sesuai dengan pendapat Lickona agar nilai-nilai karakter dipraktekkan siswa, dilakukan upaya keteladanan dan pembiasaan dalam kegiatan di sekolah, seperti memiliki rasa hormat dilakukan dengan saling tegur sapa sesama teman, guru dan pegawai lainnya, melakukan upaya bendera, membiasakan perilaku jujur dalam ulangan, berpendapat dan lain-lain.

5) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum

Subjek penelitian juga memaparkan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan anak akan menyadari sebagai manusia dalam satu waktu yang sama dapat banyak status, yang masing-

masing status akan selalu melekat hak dan kewajiban, selain itu Pendidikan Kewarganegaraan juga membahas norma-norma yang baik yang harus dijalankan masyarakat, misalnya norma hukum yang aturannya tegas, nyata dan tanggung jawab. Pemaknaan subjek penelitian tentang pendidikan hukum sebagai misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai upaya untuk memberikan kesadaran pada anak bahwa sebagai manusia dalam satu waktu yang sama dapat banyak status, yang masing-masing status akan selalu melekat hak dan kewajiban. Misal di dalam lingkungan sekolah kewajibannya yang diatur dalam tata tertib di sekolah, di dalam lingkungan masyarakat ada aturan-aturan yang disepakati masyarakat anak tersebut tinggal, dan sebagai warga negara hak dan kewajibannya diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya.

b. Kendala dalam Membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan Bersifat Multidimensional

Sebagian besar kendala pada subjek penelitian sendiri karena kurang paham dan sulit menyesuaikan perubahan materi kurikulum 2013 tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dan kekurangannya dari sisi keilmuan kurang spesifik kurang mendalam, banyak materi yang harus dikuasai. Hal ini tidak sejalan dengan kompetensi guru PPKn dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yakni terkait kompetensi guru PPKn yang harus memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic Knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Jadi dalam materi merupakan inti saja sebagai acuan untuk mengembangkan keterampilan kewarganegaraan bisa dilakukan dengan metode pembelajaran dialog yang bukan indoktrinasi mengenai semua materi harus diberikan dengan ceramah namun peserta didik

mengembangkan sendiri agar mampu mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan.

Dapat dikatakan bahwa subjek belum memahami Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional namun sekedar memenuhi silabus yang ada sehingga perubahan materi dalam kurikulum 2013 menjadi beban bagi guru meskipun ada yang subjek yang mampu memahami mengenai Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dalam kurikulum 2013 sebagai acuan.

Fakta lain yang diperoleh dari hasil penelitian ini yakni subjek menyatakan bahwa kurangnya komitmen antara *stakeholder* dalam menanamkan pendidikan karakter. *Stakeholder* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemangku kepentingan yang diartikan segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. *Stakeholder* yang dimaksud subjek penelitian tertuju pada dua lembaga yakni lembaga pemerintah selaku pembuat kebijakan kurikulum (*stakeholder* utama) dan lembaga sekolah (*stakeholder* pendukung). Diharapkan semua *stakeholder* lebih berhati-hati dalam bertindak dan menyadari hal tersebut dapat merusak karakter pada anak dan harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak terulang kembali.

Fakta lain yang diperoleh dari hasil penelitian ini yakni subjek juga mengungkapkan kendala yang bersifat teknis yakni kesulitan memahami materi karena keterbatasan jam mengajar, materinya banyak yaitu bersifat multidimensional tapi hanya sekedar kita kenalkan saja secara detail kita terbatas waktunya. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Cholisin (2015: 3) bahwa ciri khas Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru terutama adalah untuk pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*). Peneliti berharap agar subjek penelitian lebih memahami hakekat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ujung tombak pendidikan karakter dan selain itu peneliti berharap agar guru PPKn dapat

merubah pola pengajaran di dalam kelas lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak merasa terbebani dengan jam mengajar PPKn dalam kurikulum 2013.

c. Harapan guru PPKn untuk Pendidikan Kewarganegaraan Bersifat Multidimensional

Lebih di khususkan pada penelitian ini tentang harapan guru PPKn kepada siswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional sebagai berikut:

- 1) Harapan guru PPKn terhadap siswa dalam pendidikan politik yakni masalah politik hendaknya kita sebagai negara yang beradab mari kita jalankan pemerintahan yang penuh dengan ajaran politik yang baik kemudian kita kaitkan dengan hal yang sifatnya religius ya itu hal yang penting sekali karena manusia tidak lepas dari Tuhan Yang Maha Esa maka harus selalu ingat pada Tuhan dengan cara bertakwa;
- 2) Harapan guru PPKn terhadap siswa dalam pendidikan demokrasi yakni multikompleks ya tidak hanya dalam ketakwaan saja tapi juga punya karakter yang baik, pintar, inovatif, punya gagasan yang bagusm berpolitik yang bagus, bagaimana dia tahu adil, bagaimana dia harus berdemokrasi serta menanamkan hak-haknya yang sudah diatur dalam konstitusi negara
- 3) Harapan guru PPKn terhadap siswa dalam pendidikan HAM yakni menjalin hubungan antar warga negara, antar suku bangsa, berbagai macam agama yang baik sehingga hubungan itu benar-benar kita jaga dan kebhinekaan itu kita jadikan wahana bahwa Indonesia itu kaya budaya, adat, sumber daya alam dan lain-lain
- 4) Harapan guru PPKn terhadap siswa dalam pendidikan karakter yakni negara yang harus memperhatikan anak bangsa, anak bangsa yang harus memiliki keperibadian yang baik yang nantinya bisa dilihat negara-negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang besar namun juga berkepribadian baik, kepribadian rakyat Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan bersifat multidimensional akan berhasil jika warga negara mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berhubungan dengan ini dalam tujuan Pendidikan Kewarganegaraan berawal dari landasan filosofis pendidikan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jadi apabila warga negara mampu demokratis secara bertanggung jawab maka dapat dikatakan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan telah tercapai karena sebagai pedoman dalam mengembangkan suatu upaya agar nilai-nilai dapat tersampaikan pada siswa.

2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam sebuah pelaksanaan maupun penyusunan hasil penelitian. Salah satunya dalam mengajak subjek penelitian untuk bekerja sama sebagai subjek penelitian dan waktu dalam mengatur pertemuan untuk melakukan wawancara diluar jam kelas sehingga tidak mengganggu aktifitas kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga kurangnya keterbukaan subjek penelitian dalam melakukan wawancara sehingga terasa lebih kaku dan jawaban yang diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu peneliti berusaha membuat wawancara dilakukan lebih santai dan peneliti tetap

merekam dengan alat yang sudah disediakan, sehingga subjek tidak merasa seperti sedang diintrograsi dan tidak kaku dalam menyampaikan pengalaman yang pernah dialami subjek.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persepsi guru PPKn tentang Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto yaitu:
 - a. Persepsi guru PPKn mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dimaknai sebagai upaya membentuk kesadaran politik secara bertanggung jawab.
 - b. Persepsi guru PPKn mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi dimaknai sebagai upaya menanamkan kebebasan berpendapat dan musyawarah mufakat yang dipraktikkan dalam bentuk diskusi dan juga saling menghargai pendapat satu sama lain.
 - c. Persepsi guru PPKn mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan HAM dimaknai memberikan pemahaman bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki HAM yang sama sehingga dapat saling menghargai, menghormati dan melindungi HAM.
 - d. Persepsi guru PPKn mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter dimaknai membentuk sikap dan perilaku karakter religius, disiplin, saling menghargai, jiwa patriotisme dan nasionalisme terhadap negaranya dengan diberikan keteladanan dan kebiasaan di lingkungan sekolah.
 - e. Persepsi guru PPKn mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum dimaknai sebagai upaya membentuk kesadaran hukum terkait statusnya sebagai warga negara baik di lingkungan keluarga, sekolah,

masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kendala guru PPKn dalam membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto
 - a. Terbatasnya waktu dalam pembelajaran;
 - b. Guru PPKn kurang memiliki kesiapan dalam perubahan materi yang berubah-ubah dalam aturan kurikulum 2013;
 - c. Belum adanya komitmen yang sama antara pembuat kebijakan pendidikan, *stakeholder* dengan praktik lapangan;
 - d. Pengaruh global membuat Pendidikan Kewarganegaraan seperti Pancasila tanpa makna dan diamalkan dalam kehidupan.
3. Harapan guru PPKn untuk Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto
 - a. Harapan guru PPKn terhadap peserta didik untuk Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto
 - 1) Sebagai pendidikan politik peserta didik diharapkan menjalankan pemerintahan yang penuh dengan ajaran politik yang baik dan mendorong agar berpartisipasi politik.
 - 2) Sebagai pendidikan demokrasi peserta didik diharapkan menerapkan demokrasi secara konsisten dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat .
 - 3) Sebagai pendidikan HAM peserta didik diharapkan saling hormat menghormati, tidak melanggar HAM.
 - 4) Sebagai pendidikan karakter peserta didik diharapkan memiliki kepribadian yang baik yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia
 - b. Harapan guru PPKn untuk Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional di SMA Negeri se-Kota Purwokerto
 - 1) Indonesia multidimensi dalam hal kebudayaan, maka pembelajarannya harus dikaitkan dengan hal tersebut agar menjaga kebhinekaan, kerukunan

dan motivasi bahwa negara ini sangat luar biasa.

- 2) Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensi terkait hak dan kewajiban diberbagai bidang harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila.
- 3) Guru harus memberikan materi-materi yang multikompleks agar diterima oleh siswa dalam berbagai aspek seperti aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
- 4) Semua guru harus berusaha kreatif dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dan harus memahami fungsinya sebagai fasilitator dan motivator

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti merasa perlu untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pihal-pihak yang terkait sebagai upaya peningkatan perbaikan pembelajaran PKN, khususnya kepada guru PKN. Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri se-Kota Purwokerto, Jawa Tengah

- a. Guru PPKn harus berinovatif dalam membuat media pembelajaran agar dapat menyingkat waktu sehingga kompetensi dalam silabus dapat tercapai.
- b. Guru PPKn lebih banyak menambah bacaan sebagai referensi dalam mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas, khususnya sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku.
- c. Guru lebih memahami isi dan acuan dari kurikulum 2013 agar mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan lebih kreatif dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional

2. Bagi Peserta Didik SMA Negeri se-Kota Purwokerto, Jawa Tengah

- a. Peserta didik harus ikut terlibat secara aktif dalam setiap pembelajaran di kelas maupun lingkungan sekolah, peran tersebut dapat disalurkan dengan aspirasi, pandangan, keterlibatan dalam organisasi sekolah, maupun kegiatan ekstrakurikuler agar mampu menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan Bersifat multidimensional.
- b. Peserta didik harus menaati peraturan yang ada di sekolah agar tidak berkurangnya hak dan kewajibannya dalam mencari ilmu di sekolah.

3. Bagi pemerintah maupun pembuat kebijakan pendidikan

- a. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada guru PPKn agar apa yang menjadi tujuan mampu dipahami kebijakan yang telah diambil dan terkoordinasi dengan baik.
- b. Pemerintah mau menerima aspirasi, saran agar kendala yang dialami guru PPKn dalam membelajarkan Pendidikan bersifat multidimensional dapat dicarikan solusi bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. (2005). *Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Unisia, (57), 219-225.
- Cholisin & Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Yogyakarta: Ombak
- Cholisin. 2000. *Materi Pokok Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY
- _____. 2015. *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan (Perspektif Paradigma, multidimensional, Budaya Kewarganegaraan dan Prinsip Pembelajaran)*.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- _____. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (memilih di*

- antara lima pendekatan*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka
- Megawangi, Ratna. 2009. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wahab, Aziz A dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* . Bandung: AFABETA
- Zuchdi, Darmiyati. 2009. *Humanisme Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winataputra, Udin. S dan Budimansyah, Dasim. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Ombak
- http://www.krjogja.com/web/news/read/25465/Uji_Kompetensi_Guru diakses tanggal 28 Febuari 2017 pukul 16.15

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : PERSEPSI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN TENTANG PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN BERSIFAT MULTIDIMENSIONAL DI SMA
NEGERI SE-KOTA PURWOKERTO

Nama : Afriliani Khusnul Khotijah

NIM : 113401244015


Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan




Yogyakarta, November 2017

Pembimbing

Reviewer


Dr. Sunarso, M.Si
NIP. 196005211987021004


Cholisin, M.Si
NIP. 19550801 198503 1 002